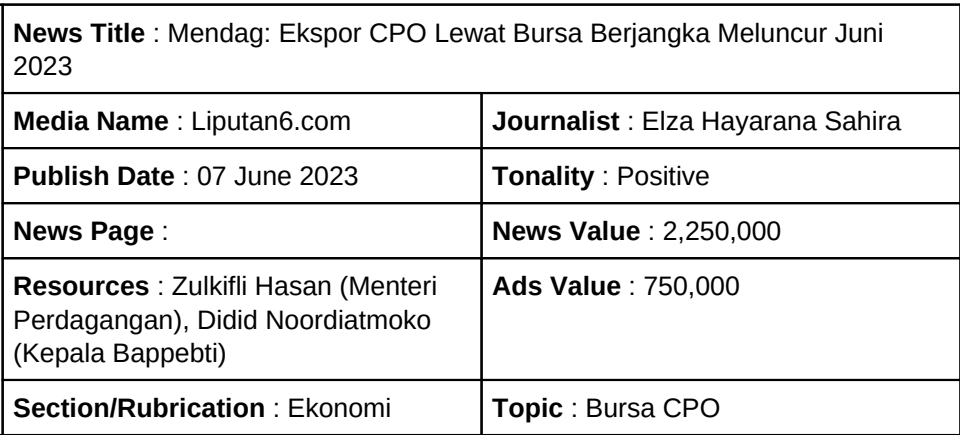




"Berkaitan dengan kebijakan tersebut diperlukan berbagai masukan agar ekspor CPO melalui bursa tidak merugikan pelaku usaha CPO. Proses bisnis yang ada sekarang tidak banyak berubah kecuali mewajibkan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kebijakan kewajiban penutupan MPO (Domestic Market Obligation) masih berlaku, sehingga eksportir tetap wajib memiliki HE terlebih dahulu. Diharapkan pelaku usaha dapat mendukung keberadaan pengaturan ekspor CPO melalui bursa berjangka ini," tandas Mending Zulkifli Hasan.

Atur CPO



Ilustrasi CPO 1 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Di sisi lain, Kepala Bappebti Didid Nooriatmoko mengatakan, saat ini ekspor melalui bursa berjangka komoditas hanya akan mengatur CPO dengan HS 15111000 dan tidak termasuk produk turunannya.

Serta, Pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor wajib memiliki Hak Ekspor (HE). Ini diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan DMO dan/atau memiliki HE yang diperoleh dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO. Bursa CPO akan membentuk harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.

"Kita ingin memastikan untuk ekspor CPO melalui bursa berjangka. Secara umum, Bappebti telah mengkoordinasikan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Badan Kebijakan Perdagangan. Selain itu, Kemendag telah menggelar konsultasi publik berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian/Lembaga serta berbagai asosiasi dan pelaku usaha terkait," terang Didid.

Ekspor CPO



Ilustrasi CPO 4 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Ia mengatakan, dalam prosesnya nantinya, akan ada tiga tahap kebijakan yakni Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia; peraturan Bappebti yang akan mengatur ketentuan teknis antara lain kelembagaan, mekanisme perdagangan, mekanisme pengawasan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan, serta Peraturan Tata Tertib (PTT) ekspor CPO melalui Bursa Berjangka.

"Diharapkan masukan pelaku usaha sektor sawit agar kebijakan tersebut dapat terlaksana, terutama pada masa transisi. Kemendag akan memastikan ekspor CPO melalui bursa dapat berjalan secara efektif," jelas Didid.

Sehingga nantinya, saat masa transisi Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ekspor CPO tersebut dicanangkan selama 60 hari untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha agar menyesuaikan dengan kebijakan yang baru dan proses sosialisasi kebijakan, serta integrasi sistem di Kementerian Perdagangan, Indonesia National Single Window (INSW), dan bursa CPO.

Masa transisi ini diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan ekspor CPO di Indonesia serta memperlancar implementasi kebijakan.

LIPUTAN 6
Sumber Data: Liputan6.com
Oleh: Anri Syahid | Foto: Liputan6.com
Grafis: Tria Ysa | Tanggal: 28 April 2022

Liputan6online
@liputan6dotcom

ALASAN LARANGAN EKSPOR CPO & BAHAN BAKU MINYAK GORENG

Presiden Joko Widodo/Jokowi Melarang Ekspor Seluruh Produk Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil/CPO Beserta Turunannya
Kebijakan Ini Efektif Berlaku 28 April 2022 Pukul 00.00 WIB

"Sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Ironis, kita malah mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng."

"Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor."

"Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting."

27 April 2022
JOKO WIDODO
Presiden RI

Perbesar

Infografis Alasan Larangan Ekspor CPO dan Bahan Baku Minyak Goreng. (Liputan6.com/Triyasn)